

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu prasyarat utama dalam mendukung proses pembangunan tersebut adalah tersedianya sumber pembiayaan yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Investasi berperan sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat karena investasi akan mendorong peningkatan produksi dan kebutuhan nasional yang kemudian akan membawa banyak dampak positif dalam kesejahteraan masyarakat mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan ekonomi masyarakat.¹

¹ M. Azizul Khakim, "Pengaruh Tenaga Dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 7, no. 1 (2022): 1–10.

Investasi yang ada di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, investasi telah tumbuh dan berkembang dari ratusan tahun lalu dan merupakan kelompok yang penting dalam pertumbuhan dan Pembangunan nasional pada suatu negara. Keberadaan investasi telah membawa berbagai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan investasi atau penanaman modal pada suatu negara merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya investasi atau penanaman modal akan menjadi pendorong yang mendorong perekonomian di berbagai lintas sektor yang akan berlabuh kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kebijakan investasi yang ada harus dapat sejalan dengan yang telah diamanatkan dalam konstitusi agar dapat bermanfaat secara optimal.²

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan investasi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.³

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena investasi akan menciptakan berbagai manfaat yang akan mendorong PAD dan

² Julianti, L. (2021). Kajian yuridis terkait pengembangan iklim investasi Indonesia di era pandemi COVID-19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 20-40.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Kemajuan investasi yang ada pada suatu daerah menjadi salah satu indikator bentuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mana investasi yang dilakukan secara tepat akan menjadi pendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan investasi, pemerintah dapat memperluas lapangan kerja, memperkuat struktur ekonomi lokal. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan, pelayanan publik, serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung.

Kebijakan investasi yang ada pada suatu daerah akan sangat berdampak kepada ekonomi kerakyatan karena investasi melibatkan berbagai pembangunan multi sektor mulai dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kekuatan nyata dalam memberikan sumber dana dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan lingkungan investasi yang kondusif agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Melihat tren investasi pada saat ini pemerintah Indonesia sangat mendukung untuk menggaet modal asing agar masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Hal ini dapat dilihat dengan ambisi pemerintah dengan menetapkan target untuk modal asing yang sebesar 2,175 triliun pada tahun 2026, hal ini menunjukkan komitmen yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini.

⁴ Dea Aprilia, “Strategi DPMPSTSP (Dpmpstsp) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menarik Palembang” (2024).

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh peneliti melalui Kementerian Investasi/BKPM, pada tahun 2025 semester 1 realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp. 942,9 triliun rupiah, angka ini meningkat sebanyak 16,2% dibanding dengan pada tahun sebelumnya di periode yang sama. Berdasarkan angka tersebut diklasifikasikan investasi yang masuk ke dalam Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang sejumlah Rp. 527,5 triliun dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 415,4 triliun.⁵ Dari angka tersebut dapat diasumsikan bahwa iklim investasi yang ada di Indonesia kondusif sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut PMK No. 53/PMK.05/2020, investasi pemerintah adalah penempatan dana/aset pemerintah dalam jangka panjang (saham, surat utang, dll.) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau lainnya, yang dikelola melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, serta dapat dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) seperti LPDP, demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.⁶ Penanaman modal atau investasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di

⁵ Bynanda, & Nanda. (2025). *Tren Investasi terbesar di Indonesia 2025: Negara, Sektor, Dan Peluang Untuk investor Muda*. Bisnis Sekarang. <https://www.bisnisekarang.com/2025/10/tren-investasi-terbesar-di-indonesia-2025.html>

⁶ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2020 pasal 1

wilayah negara Republik Indonesia. Investasi memainkan dua peran penting dalam melakukan pembangunan ekonomi.⁷

Secara nasional, investasi menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi nasional tahun 2023 mencapai Rp 1.418 triliun, melampaui target tahunan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh daerah. Beberapa wilayah masih menghadapi hambatan dalam menarik investor, khususnya daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Di tingkat regional, Provinsi Sumatera Barat sendiri masih mengalami ketimpangan investasi antar kabupaten dan kota, di mana sebagian besar penanaman modal masih terkonsentrasi di Kota Padang dan Padang Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pengembangan ekonomi antarwilayah di provinsi tersebut.

Tabel 1. 1

Data Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi Berdasarkan Tahun per Kabupaten/Kota					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Agam	153.06	61.939	94.867	405.369	704.131	374.203
Kabupaten Dharmasraya	61.771	196.398	447.408	1.050.489	496.818	495.924
Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.886	23.804	5.024	75.263	88.516	84.779
Kabupaten Lima Puluh Kota	255.767	680.498	288.846	287.11	201.993	190.799

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1

Kabupaten Padang Pariaman	1.330.300	997.635	349.277	1.205.311	3.434.599	998.925
Kabupaten Pasaman	22.374	112.588	47.58	76.176	40.044	92.02
Kabupaten Pasaman Barat	319.226	167.181	458.457	337.309	1.320.660	588.817
Kabupaten Pesisir Selatan	340.975	628.91	201.472	294.456	475.85	146.87
Kabupaten Sijunjung	67.222	36.739	126.785	255.681	437.347	391.186
Kabupaten Solok	783.165	188.271	107.676	101.965	137.896	67.278
Kabupaten Solok Selatan	289.197	442.954	325.69	418.575	671.179	564.762
Kabupaten Tanah Datar	51.404	1.728	23.108	16.002	42.174	213.683
Kota Bukittinggi	16.124	80.627	13.18	10.206	21.623	21.621
Kota Padang	1.135.121	1.446.156	1.293.921	1.432.022	1.266.304	1.853.104
Kota Padang Panjang	26.59	11.284	3.45	13.374	10.823	31.14
Kota Pariaman	33.041	29.079	2.491	1.781	7.382	16.554
Kota Payakumbuh	7.631	29.346	17.454	57.989	55.284	10.495
Kota Sawah Lunto	0	2.664	112.593	212.793	266.671	230.85
Kota Solok	3.813	23.368	12.701	22.098	14.967	23.245

Sumber: Data BKPM Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa Kabupaten Agam memiliki tingkat pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain seperti Kota Padang, Kota Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat Tingkat pertumbuhan investasi Kabupaten Agam masih tertinggal.

Seperti yang diketahui Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis, Kabupaten Agam memiliki luas wilayah sekitar 2.232,3 km². Penduduknya pada tahun 2024 tercatat sekitar 532.180 jiwa, di mana sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif. Secara geografis, Kabupaten Agam terletak di wilayah strategis antara jalur lintas provinsi yang menghubungkan Kota Padang, Bukittinggi, dan Pasaman, sehingga menjadikannya simpul penting dalam kegiatan perdagangan dan distribusi barang.



Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, pada tahun 2025 Kabupaten Agam memiliki potensi ekonomi yang signifikan terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, diikuti dengan berbagai sektor lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar yang mana jika dimanfaatkan secara maksimal dapat menarik berbagai investasi di berbagai lini sektor yang ada di Kabupaten Agam.

Dengan potensi daerah yang ada investasi yang masuk pada Kabupaten Agam masih bersifat fluktuatif terutama pada tahun 2024 ke 2025 dari yang sebelumnya realisasi investasi sebesar 724 M menjadi 400 M, hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada proses implementasi kebijakan pada tingkat pelaksana. Potensi tersebut didukung pula oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, ketersediaan tenaga kerja produktif, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong kemitraan antara pelaku usaha dan investor.

Dengan berbagai potensi tersebut, Kabupaten Agam memiliki peluang besar untuk menarik investasi di berbagai sektor, baik di bidang perdagangan, pariwisata, maupun industri kreatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya yang tersedia dengan realisasi penanaman modal yang masuk, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan penanaman modal di Kabupaten Agam.

Tabel 1. 2
Realisasi Investasi Kabupaten Agam (2020-2026)

Tahun	Target	Realisasi
2020	-	Rp 153 M
2021	Rp 15 M	Rp 61 M
2022	Rp 16 M	Rp 94 M
2023	Rp 27 M	Rp 412 M
2024	Rp 35 M	Rp 724 M
2025	Rp 728 M	Rp 400 M
2026	Rp 731 M	-

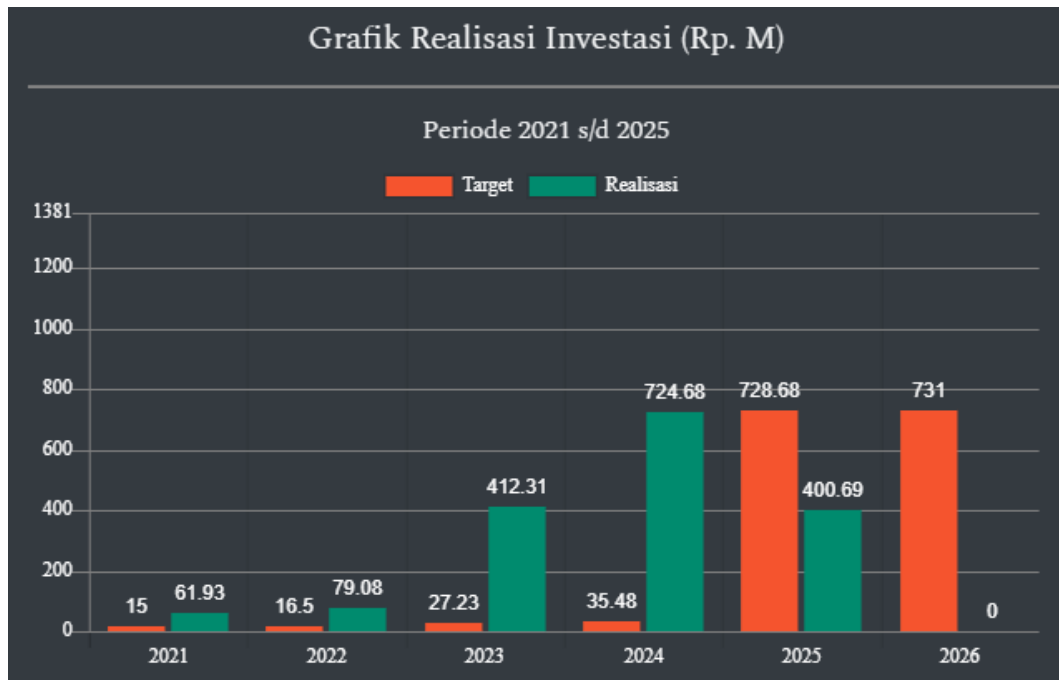
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa investasi yang masuk pada Kabupaten Agam mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada tahun 2024 ke

tahun 2025. Selanjutnya untuk lebih menjelaskan tabel akan peneliti tambahkan grafik target dan realisasi investasi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Gambar 1. 2

Realisasi Investasi Kabupaten Agam



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel 1.2 dan gambar 1.2 realisasi investasi Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun terakhir, capaian tersebut belum bersifat konsisten dan masih menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum tentu sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para penanam modal menanamkan modalnya di Kabupaten Agam, walaupun telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan membuat berbagai program seperti program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, dan program

pengendalian pelaksanaan modal belum mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam implementasi program tersebut.

Tabel 1. 3
Data PDRB Menurut Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Wilayah	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah)	
	Harga Konstan	Harga Berlaku
	2023	2023
Kepulauan Mentawai	5.914.999,06	3.320.145,50
Pesisir Selatan	18.025.679,68	10.608.286,30
Kab.Solok	17.316.412,39	11.008.006,51
Sijunjung	11.676.771,13	7.468.597,19
Tanah Datar	16.459.558,60	10.757.913,18
Padang Pariaman	25.070.850,00	13.740.822,71
Agam	26.162.658,67	16.275.984,84
Lima Puluh Kota	19.604.196,10	12.430.827,97
Pasaman	11.360.358,08	6.876.872,23
Solok Selatan	7.044.414,98	4.414.119,46
Dharmasraya	13.345.769,26	8.387.146,76
Pasaman Barat	19.544.796,46	12.684.894,15
Padang	79.704.673,23	49.316.187,06
Kota Solok	5.262.098,25	3.219.310,26
Sawahlunto	4.825.295,86	3.072.346,39
Padang Panjang	4.474.084,62	2.879.853,65
Bukittinggi	11.131.581,67	6.869.402,25
Payakumbuh	8.982.352,63	5.002.696,14
Pariaman	6.435.119,77	4.018.868,33

Sumber: BPS Sumatera Barat

Dari tabel 1.3 diatas diketahui bahwa kabupaten Agam memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat tinggi yakni tertinggi kedua setelah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat ini. Artinya aktivitas ekonomi kabupaten agam tergolong signifikan karena terdapat banyak barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut. Dan juga PDRB yang tinggi seringkali berkorelasi

dan bersangkutan dengan pendapatan rata rata masyarakat pada suatu wilayah. Dan juga PDRB yang tinggi menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan atau tingkat kemakmuran penduduknya baik, dan wilayah dengan PDRB yang tinggi menjadi sasaran investasi oleh pihak swasta maupun pemerintah karena akan mendatangkan keuntungan yang besar.

PDRB per kapita merupakan sebuah standar kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Sedangkan PDRB adalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh berbagai perekonomian pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang sering dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran wilayah pada suatu daerah di Indonesia, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah menandakan semakin makmur masyarakat wilayah tersebut, mengapa demikian karena PDRB per kapita menandakan potensi pendapatan dan tingkat pendapatan masyarakat wilayah tersebut.⁸

Berdasarkan uraian diatas diketahui angka investasi di Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, walaupun demikian angka tersebut tidak bisa jadi tolak ukur keberhasilan implementasi program yang telah dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Agam karena terdapat fluktuasi angka investasi dari tahun 2024 ke 2025, padahal jika dilihat pada data diatas kertas pada tahun 2025 Kabupaten Agam memiliki potensi dari berbagai sektor yang besar dan berpotensi untuk menarik para penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Agam, tetapi keunggulan tersebut belum digunakan secara penuh

⁸ Ayu Fatmasari Tumuleno, Kartina Rusti Riazis, and Rosnawintang, "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sulawesi Tenggara," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 189–95, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.135>.

untuk menarik investasi masuk pada Kabupaten Agam. Secara logis, daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi seharusnya mampu menarik investasi secara stabil dan berkelanjutan.

Hal ini menandakan bahwa angka fluktuasi investasi yang masuk pada Kabupaten Agam bukan disebabkan oleh potensi daerah yang kurang tetapi terdapat permasalahan pada bagaimana proses implementasi kebijakan yang sudah ada tidak dapat dijalankan secara optimal oleh DPMPTSP Kabupaten Agam untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Agam.

Dalam Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 telah ditetapkan berbagai program untuk meningkatkan angka realisasi investasi di Kabupaten Agam yaitu, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Agam, program Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam, serta membuat buku potensi investasi Kabupaten Agam agar dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ini diarahkan langsung pada peningkatan jumlah investor yang masuk dan realisasi investasi PMDN/PMA.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tidak berdiri sebagai program yang terpisah dari agenda pembangunan Kabupaten Agam. Dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, urusan penanaman modal berkaitan dengan Misi II, yaitu membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata. Misi tersebut dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya iklim investasi, strategi menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta arah kebijakan berupa fasilitasi permodalan dan pembangunan kemitraan dengan berbagai sumber permodalan. Pada tingkat perangkat daerah, arah tersebut kemudian diterjemahkan melalui Renstra DPMPTSP Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 dan dioperasionalkan setiap tahun melalui Renja DPMPTSP. Salah satu program yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Agam, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tujuan utama untuk meningkatkan investasi daerah. Informan menyatakan bahwa:

“Program pengembangan iklim penanaman modal sudah berjalan dari lama sekali dengan tujuan untuk meningkatkan investasi daerah. Dalam program ini terdapat pemberian insentif dan pembuatan peta potensi daerah. Untuk pemberian insentif dapat diberikan kepada investor yang memenuhi persyaratan, yang telah ditetapkan dengan bentuk insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah.” (Wawancara peneliti dengan Rizka Abrori Fajra, ST pada 2 Januari 2026)

Selanjutnya juga terdapat Program Promosi Penanaman Modal menekankan kepada kegiatan pemasaran untuk mengenalkan potensi investasi

kabupaten Agam melalui media dan alat promosi lainnya. Selanjutnya ada Program Pelayanan Penanaman Modal, program ini berfokus pada penyediaan pelayanan dan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan yang lebih berfokus pada pelayanan yang diberikan kepada para investor Ketika sudah menanamkan modalnya di Kabupaten Agam.

Dari ketiga program tersebut dipilihlah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk peneliti kaji lebih lanjut, karena program ini yang menentukan kondusifitas lingkungan usaha secara menyeluruh. Berbeda dengan program promosi yang bersifat informatif dan program pelayanan yang bersifat administratif, program pengembangan iklim investasi memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan investor untuk masuk atau tidak ke suatu daerah. Selain itu program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat kapasitas aparatur dalam bidang investasi, menyusun peta potensi investasi daerah, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor untuk menanamkan modalnya melalui pemberian insentif dan fasilitas pada para investor. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kondisi investasi daerah dan menarik minat investor baru.

Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMPTSP yang tercantum dalam Renja 2024, beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan program antara lain belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, terbatasnya sumber daya manusia aparatur di bidang penanaman modal, serta belum tersedianya data potensi investasi yang mutakhir dan terdigitalisasi. Selain itu, sistem pelaporan kegiatan

investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha masih belum berjalan optimal, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Agam, informan menyatakan bahwa:

“Implementasi program ini berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya, tetapi ada sub program peta potensi investasi yang tidak dijalankan pada tahun sekarang karena keterbatasan sumber daya non manusia dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar sektor yang membuat sub program ini tidak dapat berjalan.” (Wawancara peneliti dengan Rizka Abrori Fajra, ST pada 2 Januari 2026)

Permasalahan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi di lapangan. Pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Agam menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan capaian realisasi investasi. Data realisasi investasi Kabupaten Agam tahun 2020–2026 memperlihatkan tren yang fluktuatif.

Padahal jika dilihat kenyataan dilapangan Kabupaten Agam memiliki potensi yang relatif kuat dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, seperti kontribusi PDRB yang tinggi, jumlah penduduk usia produktif yang besar, serta letak geografis yang strategis diikuti dengan potensi daerah yang besar dari berbagai sektor. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi daya tarik investasi yang berkelanjutan. Fakta ini mengindikasikan bahwa persoalan investasi di Kabupaten Agam tidak semata-

mata disebabkan oleh keterbatasan potensi daerah, melainkan lebih pada bagaimana kebijakan dan program penanaman modal diimplementasikan di tingkat daerah.

Dalam perspektif Administrasi Publik, permasalahan rendahnya capaian suatu program pembangunan daerah dapat dianalisis melalui pendekatan implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, efektivitas komunikasi antar aktor, ketersediaan sumber daya, karakteristik dan struktur birokrasi pelaksana, serta sikap dan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan.⁹ Dengan demikian, kebijakan yang telah dirancang secara normatif dengan baik tetap berpotensi tidak mencapai tujuan apabila menghadapi kendala pada tahap pelaksanaannya.

Selain faktor implementasi, efektivitas kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah. Grindle menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta dukungan anggaran merupakan prasyarat penting agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal.¹⁰ Ketika kapasitas institusional tersebut belum memadai, kebijakan publik cenderung tidak menghasilkan dampak yang signifikan meskipun telah dirumuskan secara komprehensif.

⁹ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E., "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, 6(4), 1975.

¹⁰ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1997).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, implementasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan publik serta lingkungan usaha yang kondusif.¹¹ Lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, minimnya transparansi, serta rendahnya inovasi dalam pelayanan publik berpotensi menghambat terciptanya iklim investasi yang menarik bagi investor.

Selain aspek administrasi publik, keberhasilan penanaman modal juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya, seperti kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur dasar. Todaro dan Smith menyebutkan bahwa infrastruktur publik berperan sebagai *social overhead capital* yang mendukung efisiensi ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi suatu wilayah.¹² Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut dipandang sebagai elemen pendukung yang memperkuat atau melemahkan implementasi kebijakan penanaman modal di tingkat daerah.

Dari penjabaran diatas secara teoritik, rendahnya investasi di Kabupaten Agam dapat dijelaskan dengan berbagai faktor, yaitu lemahnya implementasi kebijakan publik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, infrastruktur yang belum memadai, rendahnya kualitas pelayanan publik dan SDM, serta minimnya strategi

¹¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997).

¹² Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development* (Boston: Pearson Education, 2020).

promosi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah implementasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Agam melalui pendekatan teori implementasi kebijakan dan faktor-faktor kunci investasi daerah untuk memahami sejauh mana kapasitas dan tata kelola pemerintah daerah berpengaruh terhadap peningkatan investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki peran penting namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Di satu sisi, program ini dirancang untuk menjadi motor penggerak dalam meningkatkan investasi daerah, tetapi di sisi lain, efektivitasnya masih belum terlihat secara nyata. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi program ini dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Agam, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris tentang kinerja implementasi kebijakan penanaman modal di tingkat daerah, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kapasitas dan tata kelola pemerintah daerah dalam menarik investasi ke Kabupaten Agam, akhirnya rumuskanlah sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya realisasi investasi di Kabupaten Agam meskipun memiliki potensi ekonomi daerah yang besar, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di bidang penanaman modal, serta memperkaya pemahaman empiris mengenai penerapan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam konteks pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan investasi daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

